



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 34 TAHUN 2024**

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025**

NOMOR: 15 / RENJA-DPMPTSP NAKER/2024

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 85);

14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja PD Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- (4) Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. Bab V : Penutup
- (2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Nomor Renja PD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

A blue ink signature is written over the text of the Sekretaris Daerah.

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN URUTAN NOMOR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NOMOR RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4
1	01/RENJA-MPD/2024	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
2	02/RENJA-PK/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	03/RENJA-DINKES/2024	Dinas Kesehatan	
4	04/RENJA-PUPR/2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
5	05/RENJA-BPBD/2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	06/RENJA-SATPOL PPWH/2024	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
7	07/RENJA-DINSOS/2024	Dinas Sosial	
8	08/RENJA-DP3AP2KB/2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
9	09/RENJA-DISTANAH/2024	Dinas Pertanahan	
10	10/RENJA-DLH/2024	Dinas Lingkungan Hidup	
11	11/RENJA-DISDUKCAPIL/2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12	12/RENJA-DPMG/2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
13	13/RENJA-DISHUB/2024	Dinas Perhubungan	
14	14/RENJA-DISKOMINFO/2024	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	
15	15/RENJA-DPMPSTP NAKER/2024	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
16	16/RENJA-DISPORAPAR/2024	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

NO	NOMOR RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4
17	17/RENJA-MAA/2024	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
18	18/RENJA-DISPUSIP/2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
19	19/RENJA-DKPPP/2024	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
20	20/RENJA-DISPERINDAGKOP/2024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
21	21/RENJA-SETDAKO/2024	Sekretariat Daerah	
22	22/RENJA-SETWAN/2024	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	
23	23/RENJA-BAPPEDA/2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
24	24/RENJA-BPKD/2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
25	25/RENJA-BKPSDM/2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
26	26/RENJA-INSPEKTORAT/2024	Inspektorat	
27	27/RENJA-BANDA SAKTI/2024	Kecamatan Banda Sakti	
28	28/RENJA-BLANG MANGAT/2024	Kecamatan Blang Mangat	
29	29/RENJA-MUARA SATU/2024	Kecamatan Muara Satu	
30	30/RENJA-MUARA DUA/2024	Kecamatan Muara Dua	
31	31/RENJA-KESBANGPOL/2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
32	32/RENJA-MPU/2024	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
33	33/RENJA-BAITUL MAL/2024	Sekretariat Baitul Mal	
34	34/RENJA-DSIPD/2024	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1.Latar Belakang.....	I-1
1.2.Landasan Hukum.....	I-3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4.Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah.....	II-8
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-21
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe	II-24
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-25
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III
3.1.Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-34
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	III-36
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-47
BAB V PENUTUP	V- 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 I-3

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	II-15
TABEL 2.2	II-22
TABEL 2.4	II-26
TABEL 2.5	II-33
TABEL 3.1	III-41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

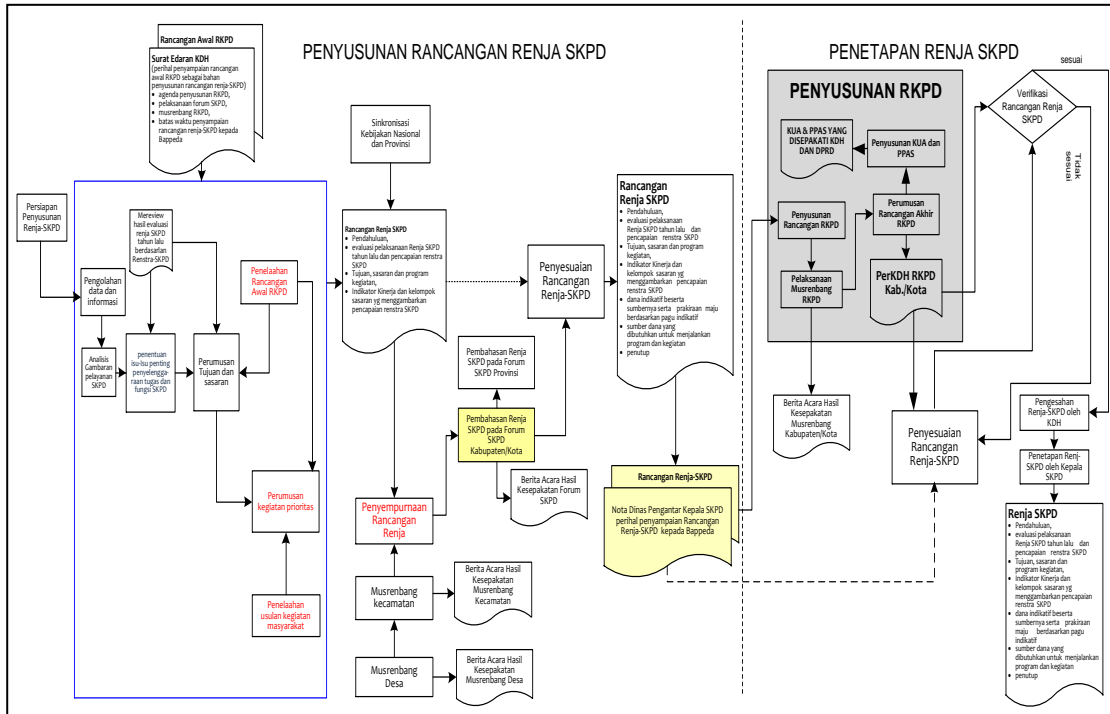
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana RKPD dijadikan dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sedangkan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yaitu : **"Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing** dengan Indikator Tujuan adalah **Persentase Pertumbuhan Ekonomi"**.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Renja perangkat daerah disusun mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun bagan Alir tahapan penyusunan Renja perangkat daerah sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar I
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja DPMPSTP dan NAKER
Kota Lhokseumawe



Sumber : Lampiran VI, Permendagri 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;

11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe 2023-2026;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025;
20. Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 050/4/SE/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Sedangkan tujuan sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui program yang terpadu Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe melaksanakan 9 program dan 16 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 7 kegiatan;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan 1 kegiatan;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 2 kegiatan;
4. Program Hubungan Industrial, dengan 1 kegiatan;
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan 1 kegiatan;
6. Program Promosi Penanaman Modal, dengan 1 kegiatan;
7. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 kegiatan;
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan 1 kegiatan;
9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan 1 kegiatan;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan tingkat capaian kinerja renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023 sebesar 97.90% yang termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi. Target Anggaran Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah Rp. 7.003.522.985,- sedangkan Realisasi Anggaran Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah Rp. 6.856.729.052,- sehingga persentase Realisasi Anggaran Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah sebesar 97.90% yang termasuk dalam kategori predikat Sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023 yang mengacu pada Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tidak ada Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, karena capaian realisasi fisik dan keuangan secara keseluruhan sudah sangat Baik.

- b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 Kegiatan yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 15,340,000,- terealisasi sebesar Rp. 15,339,645,- atau 100.00 % dengan output tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 4,646,002,645,- terealisasi sebesar Rp. 4,577,096,043,- atau 98.52% dengan output Periode tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan laporan administrasi keuangan perangkat daerah 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 12,000,000,-

teralisasi sebesar Rp. 11,215,070,- atau 93.46% dengan output tersedianya pakaian dinas, laporan pendataan dan pengoahan administrasi kepegawaian serta Diklat ASN selama 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%.

- Administrasi umum perangkat daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 182,140,000,- terealisasi sebesar Rp. 182,118,284,- atau 99.99% dengan output periode terlaksana pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 10,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 9,920,520,- atau 99.21% dengan output periode terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100 %.
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 394,667,140,- terealisasi sebesar Rp. 358,110,885,- atau 90.74% dengan output periode tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 84,600,000,- terealisasi sebesar Rp. 83,400,500,- atau 98.58% dengan output periode terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 12 Bulan terealisasi sebanyak 12 Bulan atau 100%.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 783,173,200,- terealisasi sebesar Rp. 770,583,886 atau 98.39%.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:
 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14,998,555,- atau 99.99%.
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 20,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 19,996,345,- atau 99.98%.
 4. Program Hubungan Industrial, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:
 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota dengan rencana anggaran sebesar Rp. 70,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 69,995,290,- atau 99.99%.
 5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal , terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:
 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 58,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 57,873,105,- atau 99.78%.
 6. Program Promosi Penanaman Modal , dengan 1 kegiatan yaitu :
 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19,995,660,- atau 99.98%.
 7. Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang

menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 179,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 173,613,644,- atau 96.99%.

8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 503,200,000,- terealisasi sebesar Rp. 482,072,220 atau 95.80%.

9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 10.400.000.- terealisasi sebesar Rp. 10,399,400.- atau 99.99%.

c. Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun anggaran 2023 pada DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe.

Pada Tahun 2023 tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja yang ditetapkan.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Tidak ada faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan pada Tahun 2023 karena semua program/kegiatan tercapai dan terpenuhi target kinerjanya sesuai dengan penyusunan rencana anggaran.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program/Kegiatan yang mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan karena semua program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Program dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan:

- RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari 1 Kegiatan bisa tercapai 98.39%, hal ini disebabkan karena semua program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana sesuai dengan yang di rencanakan. Program dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Program Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari 2 Kegiatan realisasinya bisa tercapai 99.99%, hal ini disebabkan karena semua program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana dengan sesuai dengan yang di rencanakan. Kinerja Penempatan Tenaga Kerja terlaksana sesuai dengan perencanaan anggaran. Program dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja.
- Program Hubungan Industrial, terdiri dari 1 Kegiatan realisasinya bisa tercapai 99.99%, kinerja pelaksanaan kegiatan dapat menyelesaikan kasus perselisihan pekerja dengan pengusaha dengan perjanjian bersama selesai dengan baik.
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal , terdiri dari 1 Kegiatan realisasinya bisa tercapai 99.78%, kinerja kegiatan terlaksana dengan sesuai dengan yang di rencanakan.
- Program Promosi Penanaman Modal , dengan 1 kegiatan realisasinya bisa tercapai 99.98%, kinerja kegiatan Promosi Penanaman Modal terlaksana dengan sesuai dengan yang di rencanakan.
- Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan realisasinya bisa tercapai 96.99%, kinerja kegiatan Pelayanan Penanaman Modal terlaksana dengan sesuai dengan yang di rencanakan.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan realisasinya bisa tercapai 95.80%, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan.

- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 Kegiatan realisasinya bisa tercapai 99.99%, pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sesuai dengan yang di rencanakan.

Faktor penyebab tercapainya kinerja semua program/kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

f. Kebijakan Realisasi Program/Kegiatan yang mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DN TENAGA KERJA KOTA LHOEKSEUMAWE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024 (n-1)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	C	Realisasi >/=/<	K	Rp	Rp	Rp								
1	2	3		4		5		6		7			8		9		10=5+7+9	11=10/4	15	16				
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			23,702,436,423		-		7,003,522,985		6,856,729,052	0.00%	97.90%		6,464,143,544	13,320,872,596	56.20%	DPMPTSPTK						
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			20,415,515,576			100	6,232,922,985	100	6,112,775,023	100.00%	98.07%	<	100	5,636,984,544	11,749,759,567	57.55%	DPMPTSPTK					
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	19,707,749,339	-	-	100	5,344,749,785	100	5,237,200,947	100.00%	97.99%	<	100	5,308,209,220	10,545,410,167	53.51%	DPMPTSPTK			
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Buku	16	63,620,000	-	-	4	15,340,000	4	15,339,645	100.00%	100.00%	=	4	10,000,000	25,339,645	39.83%	DPMPTSPTK		
2	07	01	02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku	16	63,620,000	-	-	4	15,340,000	4	15,339,645	100.00%	100.00%	=	4	10,000,000	25,339,645	39.83%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	100.00%	=				39.83%	DPMPTSPTK					
Predikat Kinerja												ST	ST					SR	DPMPTSPTK					
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	16,262,832,539	-	-	12	4,646,002,645	12	4,577,096,043	100.00%	98.52%	<	12	4,163,268,000	4,577,096,043	28.14%	DPMPTSPTK		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	48	16,262,832,539	-	-	12	4,646,002,645	12	4,577,096,043	100.00%	98.52%	<	12	4,163,268,000	4,577,096,043	28.14%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	98.52%	<				28.14%	DPMPTSPTK					
Predikat Kinerja												ST	ST					SR	DPMPTSPTK					
2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Orang	14	56,000,000	-	-	3	12,000,000	3	11,215,070	100.00%	93.46%	<	3	12,000,000	11,215,070	20.03%	DPMPTSPTK		
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	14	56,000,000	-	-	3	12,000,000	3	11,215,070	100.00%	93.46%	<	3	12,000,000	11,215,070	20.03%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	93.46%	<				20.03%	DPMPTSPTK					
Predikat Kinerja												ST	ST					SR	DPMPTSPTK					
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	814,560,000	-	-	100	182,140,000	100	182,118,284	100.00%	99.99%	<	97,140,000	182,118,284	22.36%	DPMPTSPTK			
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	48	132,000,000	-	-	12	25,000,000	12	24,990,868	99.96%	99.96%	=	12	20,000,000	24,990,868	18.93%	DPMPTSPTK	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	46	68,000,000	-	-	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	=	11	11,000,000	11,000,000	16.18%	DPMPTSPTK	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	48	220,000,000	-	-	12	55,000,000	12	54,992,200	99.99%	99.99%	=	12	15,000,000	54,992,200	25.00%	DPMPTSPTK	
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bulan	48	4,560,000	-	-	12	1,140,000	12	1,140,000	100.00%	100.00%	=	12	1,140,000	1,140,000	25.00%	DPMPTSPTK	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	48	390,000,000	-	-	12	90,000,000	12	89,995,216	99.99%	99.99%	=	12	50,000,000	89,995,216	23.08%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												99.99%	99.99%					21.64%	DPMPTSPTK					
Predikat Kinerja												ST	ST					SR	DPMPTSPTK					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	C	Realisasi >/=/<	K	Rp	Rp	Rp						
1	2	3		4		5		6		7		8			9		10=5+7+9	11=10/4	15	16				
2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	459,940,000	-	-	100	10,000,000	100	9,920,520	100.00%	99.21%	<	100	510,000,000	9,920,520	2.16%	DPMPTSPTK		
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jenis	45	459,940,000	-	-	12	10,000,000	12	9,920,520	100.00%	99.21%	<	12	510,000,000	9,920,520	2.16%	DPMPTSPTK	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.21%				2.16%	DPMPTSPTK				
												Predikat Kinerja		ST	ST				SR	DPMPTSPTK				
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,666,396,800	-	-	100	394,667,140	100	358,110,885	100.00%	90.74%	<	100	431,201,220	358,110,885	21.49%	DPMPTSPTK		
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Materai	Bulan	48	6,000,000	-	-	12	1,500,000	12	1,490,000	100.00%	99.33%	<	12	1,500,000	1,490,000	24.83%	DPMPTSPTK	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	48	660,000,000	-	-	12	118,701,220	12	85,889,601	100.00%	72.36%	<	12	115,901,220	85,889,601	13.01%	DPMPTSPTK	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	1,000,396,800	-	-	2	274,465,920	2	270,731,284	100.00%	98.64%	<	2	313,800,000	270,731,284	27.06%	DPMPTSPTK	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	90.11%				21.64%	DPMPTSPTK				
												Predikat Kinerja		ST	ST				SR	DPMPTSPTK				
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	384,400,000	-	-	100	84,600,000	100	83,400,500	100.00%	98.58%	<	100	84,600,000	83,400,500	21.70%	DPMPTSPTK		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	UB	1	137,200,000	-	-	1	34,100,000	1	33,401,000	100.00%	97.95%	<	1	34,100,000	33,401,000	24.34%	DPMPTSPTK	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UB	1	125,200,000	-	-	1	25,500,000	1	25,099,500	100.00%	98.43%	<	1	25,500,000	25,099,500	20.05%	DPMPTSPTK	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Uit	14	20,000,000	-	-	14	5,000,000	14	4,900,000	100.00%	98.00%	<	14	5,000,000	4,900,000	24.50%	DPMPTSPTK	
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung	2	102,000,000	-	-	1	20,000,000	1	20,000,000	100.00%	100.00%	=	1	20,000,000	20,000,000	19.61%	DPMPTSPTK	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	98.59%				22.13%	DPMPTSPTK				
												Predikat Kinerja		ST	ST				SR	DPMPTSPTK				
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		100.00%	97.12%				22.22%	DPMPTSPTK				
												PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		ST	ST				SR	DPMPTSPTK				
2	07	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase	100	232,574,956	-	-	100	783,173,200	100	770,583,886	100.00%	98.39%	<	100	177,750,324	770,583,886	331.33%	DPMPTSPTK		
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan dan Koordinasi Lintas Lembaga	Orang	233	232,574,956	-	-	53	783,173,200	103	770,583,886	194.34%	98.39%	<	20	177,750,324	770,583,886	331.33%	DPMPTSPTK		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026		Kealisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	C	Realisasi >/=/<	K	Rp	Rp	Rp						
1	2	3		4		5		6		7		8			9		10=5+7+9	11=10/4	15	16				
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	Orang	233	232,574,956	-	-	53	783,173,200	103	770,583,886	194.34%	98.39%	<	20	177,750,324	770,583,886	331.33%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												194.34%	98.39%				331.33%	DPMPTSPTK						
Predikat Kinerja												ST	ST				ST	DPMPTSPTK						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)												111.79%	97.10%				60.87%	DPMPTSPTK						
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)												ST	ST				R	DPMPTSPTK						
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	100	113,140,781	-	-	100	35,000,000	100	34,994,900	100.00%	99.99%	=	100	116,025,000	34,994,900	30.93%	DPMPTSPTK	
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penertiban Izin LPTKS	Bulan	48	67,884,469	-	-	12	15,000,000	12	14,998,555	100.00%	99.99%	=	12	105,000,000	14,998,555	22.09%	DPMPTSPTK	
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Bulan	48	67,884,469	-	-	12	15,000,000	12	14,998,555	100.00%	99.99%	=	12	105,000,000	14,998,555	22.09%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	99.99%				22.09%	DPMPTSPTK						
Predikat Kinerja												ST	ST				SR	DPMPTSPTK						
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi Pasar Kerja	Orang	1050	45,256,313	-	-	1050	20,000,000	402	19,996,345	38.29%	99.98%	=	1,060	11,025,000	19,996,345	44.18%	DPMPTSPTK	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Orang	4200	45,256,313	-	-	1050	20,000,000	402	19,996,345	38.29%	99.98%	=	1,060	11,025,000	19,996,345	44.18%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												38.29%	99.98%				44.18%	DPMPTSPTK						
Predikat Kinerja												SR	ST				SR	DPMPTSPTK						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)												69.14%	99.99%				33.14%	DPMPTSPTK						
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)												S	ST				SR	DPMPTSPTK						
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	Persen	100	362,050,500	-	-	100	70,000,000	43	69,995,290	43.00%	99.99%	=	41	35,000,000	69,995,290	19.33%	DPMPTSPTK	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Perselisihan	Kasus	200	362,050,500	-	-	39	70,000,000	43	69,995,290	110.26%	99.99%	=	41	35,000,000	69,995,290	19.33%	DPMPTSPTK	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di satu Daerah Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	200	362,050,500	-	-	39	70,000,000	43	69,995,290	110.26%	99.99%	=	41	35,000,000	69,995,290	19.33%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												110.26%	99.99%				19.33%	DPMPTSPTK						
Predikat Kinerja												ST	ST				SR	DPMPTSPTK						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)												110.26%	99.99%				19.33%	DPMPTSPTK						
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)												ST	ST				SR	DPMPTSPTK						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)												93.64%	98.07%				38.74%	DPMPTSPTK						
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)												ST	ST				SR	DPMPTSPTK						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	C	Realisasi >/=/<	K	Rp	Rp	Rp					
1	2	3		4		5		6		7		8			9		10=5+7+9	11=10/4	15	16			
2	18						3,286,920,847	-	-		770,600,000	100		743,954,029	126.15%	96.54%	<		827,159,000	743,954,029	22.63%	DPMPTSPTK	
2	18	02					291,450,653	-	-	100	58,000,000	100		57,873,105	100.00%	99.78%	=	100	25,000,000	57,873,105	19.86%	DPMPTSPTK	
2	18	02	2.01				291,450,653	-	-	5	58,000,000	5		57,873,105	100.00%	99.78%	=	1	25,000,000	57,873,105	19.86%	DPMPTSPTK	
2	18	02	2.01	01			45,256,313	-	-	5	10,000,000	5		9,986,115	100.00%	99.86%	=	1	25,000,000	9,986,115	22.07%	DPMPTSPTK	
2	18	02	2.01	02			246,194,340	-	-	300	48,000,000	300		47,886,990	100.00%	99.76%	=	-	-	47,886,990	19.45%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	99.76%				19.45%	DPMPTSPTK					
Predikat Kinerja												ST	ST				SR	DPMPTSPTK					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)												100.00%	99.77%				19.65%	DPMPTSPTK					
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)												ST	ST				SR	DPMPTSPTK					
2	18	03					90,512,625	-	-	100	20,000,000	100		19,995,660	100.00%	99.98%	=	2	30,000,000	19,995,660	22.09%	DPMPTSPTK	
2	18	03	2.01				90,512,625	-	-	2	20,000,000	2		19,995,660	100.00%	99.98%	=	2	30,000,000	19,995,660	22.09%	DPMPTSPTK	
2	18	03	2.01	01			45,256,313	-	-	1	10,000,000	1		9,998,770	100.00%	99.99%	=	1	15,000,000	9,998,770	22.09%	DPMPTSPTK	
2	18	03	2.01	02			45,256,313	-	-	1	10,000,000	1		9,996,890	100.00%	99.97%	=	1	15,000,000	9,996,890	22.09%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	99.98%				22.09%	DPMPTSPTK					
Predikat Kinerja												ST	ST				SR	DPMPTSPTK					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)												100.00%	99.98%				22.09%	DPMPTSPTK					
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)												ST	ST				SR	DPMPTSPTK					
2	18	04					783,695,481	-	-	100	179,000,000	100		173,613,644	100.00%	96.99%	=	100	95,000,000	173,613,644	22.15%	DPMPTSPTK	
2	18	04	2.01				783,695,481	-	-	12	179,000,000	12		173,613,644	100.00%	96.99%	=	12	95,000,000	173,613,644	22.15%	DPMPTSPTK	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026		Kealisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	C	Realisasi >/=/<	K	Rp	Rp	Rp						
1	2	3		4		5		6		7		8			9		10=5+7+9	11=10/4	15	16				
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Layanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1340	121,239,063	-	-	335	28,000,000	335	27,988,851	100.00%	99.96%	=	340	25,000,000	27,988,851	23.09%	DPMPTSPTK	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Observasi Lapangan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	1340	341,356,168	-	-	335	80,000,000	335	74,633,458	100.00%	93.29%	<	340	40,000,000	74,633,458	21.86%	DPMPTSPTK	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terintegrasi	Orang	400	253,590,750	-	-	100	56,000,000	100	55,991,470	100.00%	99.98%	<	12	20,000,000	55,991,470	22.08%	DPMPTSPTK	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Layanan Informasi Perizinan Berusaha secara Online dan Terintegrasi	Kegiatan Usaha	1340	67,509,500	-	-	335	15,000,000	335	14,999,865	100.00%	100.00%	=	1	10,000,000	14,999,865	22.22%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	98.31%				22.31%	DPMPTSPTK						
Predikat Kinerja												ST	ST				SR	DPMPTSPTK						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)												100.00%	99.43%				22.20%	DPMPTSPTK						
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)												ST	ST				SR	DPMPTSPTK						
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Indek Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Persentase	100	2,074,195,206	-	-	100	503,200,000	100	482,072,220	100.00%	95.80%	<	100	669,159,000	482,072,220	23.24%	DPMPTSPTK	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bulan	48	2,074,195,206	-	-	12	503,200,000	12	482,072,220	100.00%	95.80%	<	12	669,159,000	482,072,220	23.24%	DPMPTSPTK	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	280	268,250,000	-	-	50	65,000,000	50	64,757,420	100.00%	99.63%	<	11	91,373,000	64,757,420	24.14%	DPMPTSPTK	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	884	1,321,145,206	-	-	221	338,421,600	221	328,636,600	100.00%	97.11%	<	290	335,039,000	328,636,600	24.88%	DPMPTSPTK	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	960	484,800,000	-	-	240	99,778,400	240	88,678,200	100.00%	88.88%	<	79	242,747,000	88,678,200	18.29%	DPMPTSPTK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	95.20%				22.44%	DPMPTSPTK						
Predikat Kinerja												ST	ST				SR	DPMPTSPTK						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)												100.00%	92.04%				20.36%	DPMPTSPTK						
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)												ST	ST				SR	DPMPTSPTK						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026		Kealisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	C	Realisasi >/=/<	K	Rp	Rp	Rp				
1				2	3		4		5		6		7		8			9		10=5+7+9	11=10/4	15	16		
2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Ketersediaan Data Base Perzinan	Persentase	100	47,066,882	-	-	100	10,400,000	100	10,399,400	100.00%	99.99%	=	1	8,000,000	10,399,400	22.09%	DPMPTSPTK			
2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Ketersediaan Data Base Perzinan	Dokumen	4	47,066,882	-	-	1	10,400,000	1	10,399,400	100.00%	99.99%	=	1	8,000,000	10,399,400	22.09%	DPMPTSPTK			
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	4	47,066,882	-	-	1	10,400,000	1	10,399,400	100.00%	99.99%	=	1	8,000,000	10,399,400	22.09%	DPMPTSPTK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100.00%	99.99%							22.09%	DPMPTSPTK	
Predikat Kinerja															ST	ST							SR	DPMPTSPTK	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)															100.00%	99.99%							22.09%	DPMPTSPTK	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)															ST	ST							SR	DPMPTSPTK	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)															100.00%	98.51%							22%	DPMPTSPTK	
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)															ST	ST							SR	DPMPTSPTK	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)															96.82%	98.29%							30.32%	DPMPTSPTK	
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)															ST	ST							SR	DPMPTSPTK	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan peraturan perundangan terutama Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe mempunyai beberapa indikator yaitu :

- a. Sasaran Strategis
 1. Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi
 2. Meningkatnya Kesempatan Kerja
- b. Indikator Kinerja Utama
 1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
 2. Jumlah Investor (PMDN/PMA)
 3. Tingkat Pengangguran Terbuka
- c. Indikator Kinerja Daerah
 1. Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah
 2. Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
 3. Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan
 4. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 5. Persentase Kemudahan Penanaman Modal
 6. Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal
 7. Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan
 8. Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi
 9. Ketersediaan Database Perizinan

Capaian kinerja berdasarkan indikator tersebut diatas yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Lhokseumawe

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD)											
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
1	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah			100	100	100	100	50.00		100	100	
2	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan			13.33	14.29	15.00	15.56	6.89		15.00	15.56	
3	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan			54.17	53.57	55.63	57.22	11.24		55.63	57.22	
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			100%	100%	100%	100%	33.33		100%	100%	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
5	Persentase Kemudahan Penanaman Modal			33.33	40.00	40.00	46.67	54.28		40.00	46.67	

6	Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal			20.00	20.00	30.00	20.00	-		30.00	20.00	
7	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan			87.34	87.66	87.98	88.30	180.86		87.98	88.30	
8	Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi			77.75	76.83	75.98	75.19	93.62		75.98	75.19	
9	Ketersediaan Database Perizinan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	
	Indikator Kinerja Utama (IKU)											
				3.471	3.541	6.612	3.684	249		6.612	3.684	
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional											
2	Jumlah Investor (PMDN/PMA)			452	472	492	512	413		492	512	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka			11.12	11.08	11.06	11.04	8.78		11.06	11.04	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, isu-isu penting dalam penyelenggaraan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan yaitu :

1. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik.
2. belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM, adanya keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki belum menandai dalam memperlancar pelayanan publik dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. belum maksimalnya tingkat kinerja pelayanan, penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi, tantangan dan peluang untuk meningkatkan pelayanan kemudahan layanan perizinan dan non perizinan, layanan kepala penyandang disabilitas dan lansia.
4. belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang kesadaran pentingnya surat perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe maka perlu upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan proses penyelenggaraan pelayanan

perizinan terpadu satu pintu melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan sehingga menghasilkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.

2. peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai.
3. peningkatan sosialisasi/bimbingan teknis kemudahan berusaha melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPK

Rancangan awal yang telah disusun Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe yang merupakan bagian dari urusan wajib dibidang penanaman modal, otonomi daerah dan tenaga kerja telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang diharapkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam setiap tahunnya.

Dalam dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, akan tetapi pada rancangan awal program dan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe terdapat kekurangan anggaran sehingga dilakukan review terhadap beberapa kegiatan berupa penambahan anggaran, sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang merupakan bagian dari urusan wajib Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat pada lampiran (Tabel 2.3).

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPKD TAHUN 2025
KOTA LHOKEUMAWA

MA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting				
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA					5,881,508,844					6,946,715,333				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5,881,508,844					6,946,715,333				
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,936,185,470		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,842,556,333				
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15,000,000				
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15,000,000	
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,904,723,245				
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	612 Orang/bulan	4,064,861,270	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	612 Orang/bulan	4,904,723,245	
2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,000,000				
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	16,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	12,000,000	
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah			137,140,000				
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	33,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20,000,000	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	17,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11,000,000	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	55,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30,000,000	

2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,140,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,140,000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	75,000,000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			114,985,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150,000,000
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	114,985,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150,000,000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			421,599,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				539,093,088
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	170,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	333,353,088
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	250,099,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	204,240,000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			96,600,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84,600,000
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34,100,000

2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	31,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	25,500,000
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5,000,000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,000,000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				75,998,214	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				115,000,000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			63,950,000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			105,000,000
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30 Orang	58,900,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30 Orang	100,000,000
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	5,050,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	5,000,000
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12,048,214	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10,000,000
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Lhokseumawe, Semua	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	11 Lembaga	12,048,214	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Lhokseumawe, Semua	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	11 Lembaga	10,000,000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			28,940,625	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			115,000,000

2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			17,364,375	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	17,364,375	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	100,000,000
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11,576,250	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15,000,000
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700 Orang	11,576,250	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700 Orang	15,000,000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				92,610,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				50,000,000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				92,610,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				50,000,000
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	45 Perkara	92,610,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	45 Perkara	50,000,000
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				747,774,535	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				824,159,000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				11,576,250	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				15,000,000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				11,576,250	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				15,000,000
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	11,576,250	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	15,000,000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				23,152,500	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				30,000,000

2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					23,152,500	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				30,000,000		
2	18	03	2.01	0001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		11,576,250	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		15,000,000	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		11,576,250	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		15,000,000	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					201,006,168	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					100,000,000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					201,006,168	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					100,000,000	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		17,500,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		15,000,000	
2	18	04	2.01	0008	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	340 Kegiatan Usaha		30,900,000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	340 Kegiatan Usaha		25,000,000	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Pelaku Usaha		64,350,000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Pelaku Usaha		20,000,000	
2	18	04	2.01	0004	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	275 Kegiatan Usaha		88,256,168	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	275 Kegiatan Usaha		40,000,000	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					500,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					669,159,000	

2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				500,000,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				669,159,000		
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 Kegiatan Usaha	67,500,000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 Kegiatan Usaha	91,373,000		
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	290 Pelaku Usaha	305,350,000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	290 Pelaku Usaha	335,039,000		
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan EvaluasiPenilaian KepatuhanPelaksanaan Perizinan Berusaha	79 Kegiatan Usaha	127,150,000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan EvaluasiPenilaian KepatuhanPelaksanaan Perizinan Berusaha	79 Kegiatan Usaha	242,747,000		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				12,039,617	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				10,000,000		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12,039,617	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10,000,000		
2	18	06	2.01	0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	12,039,617	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	10,000,000		
TOTAL									5,881,508,844						6,946,715,333	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tentang proses pengajuan Program/Kegiatan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan isu penting penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe telah melalui proses musrenbang Kota Lhokseumawe, selanjutnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menentukan kegiatan prioritas sesuai dengan tupoksi perangkat daerah dan kegiatan usulan dari masyarakat yang berdasarkan usulan Gampong maka dapat diakomodir 1 (Satu) Kegiatan sebagai berikut dalam tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Lhokseumawe

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Usulan
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				45,000,000	
1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (Pelatihan Service AC)	Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti KotaLhokseumawe	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	5 Orang	45,000,000	Keuchik Kampung Jawa Lhokseumawe

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/ Provinsi

Perencanaan pembangunan nasional pada Tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tema RKP Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dijabarkan dalam 5 agenda pembangunan yaitu :

1. transformasi sosial;
2. transformasi ekonomi;
3. transformasi tata kelola;
4. supremasi hukum, stabilitas;
5. kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi;

Disamping arah dan kebijakan makro tersebut, dalam pelaksanaannya untuk Tahun 2025 RKP (Rencana Kerja Pemerintah) memiliki pedoman 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

- gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan;
 8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan tema pembangunan Pemerintah Aceh yang tercantum pada RKPA Tahun 2025 yaitu **“Mengurangi Ketimpangan Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”**. Tema pembangunan tersebut mempunyai makna bahwa pembangunan Aceh Tahun 2025 diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, untuk pencapaian tema pembangunan di atas dirumuskan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2025 yang meliputi :

1. memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian;
2. memantapkan kemandirian pangan, energi, air serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja

dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi;

4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset inovasi pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda;
5. memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan;
6. memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Pemerintah Aceh tersebut di atas. Maka tema pembangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe yaitu : **“Meningkatkan infrastruktur Kota Lhokseumawe berkualitas dengan memperhatikan tata kelola lingkungan hidup yang baik serta peningkatan layanan publik melalui digitalisasi”**. Dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yaitu :

1. Infrastruktur;
2. Lingkungan Hidup;
3. Reformasi Birokrasi;
4. Kesehatan;
5. Pendidikan;
6. Pertumbuhan Ekonomi;
7. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025 berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang merupakan

fungsi/bidang kewenangannya dengan tujuan **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing**, dengan Indikator Tujuan adalah **Persentase Pertumbuhan Ekonomi. Dengan sasaran sebagai berikut :**

1. Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi; dengan indikator sasaran adalah Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) dan Jumlah Investor (PMDN/PMA).
2. Meningkatnya Kesempatan Kerja; dengan indikator sasaran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran DPMPTSP dan NAKER adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap, alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe berkewajiban memberikan dukungan ikut strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kota yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran Pemerintah Kota yang atas dengan fungsi/bidang kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe adalah:

1. menekan angka tingkat pengangguran terbuka;
2. mewujudkan Kota Lhokseumawe sebagai daerah investasi;
3. mewujudkan pelayanan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dan sistem kerja yang baik;
4. meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat secara optimal dan profesional;
5. meningkatnya kinerja layanan perizinan dan meningkatnya kualitas SDM layanan perizinan;
6. merancang Peraturan dan kebijakan tentang kemudahan perizinan dan non perizinan bagi penanaman modal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) di tetapkan sasaran dan indikator sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe tahun 2025 yang mengacu pada target yang telah ditetapkan pada review Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Target Indikator Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
1	Turwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing		Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.40-4.50
		Meningkatkannya jumlah dan Nilai Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp.Milyar	500
			Total Insvestor (PMDN/PMA)	Perusahaan	492
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.98-7.48
		Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100%

Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebagaimana table berikut :

Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Bidang Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah	Satuan	Target
	TENAGA KERJA		
1	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100
2	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Persen	15.00
3	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	Persen	55.63
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100.00
	PENANAMAN MODAL		
5	Persentase Kemudahan Penanaman Modal	Persen	40.00
6	Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal	Persen	30.00
7	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks	87.98
8	Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Indeks	75.98
9	Ketersediaan Database Perizinan	Ada/Tidak	Ada

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, DPMPSTP dan NAKER merupakan organisasi yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan administratif dibidang

penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan atau yang terkait dengan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa bidang ataupun dalam merangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pertumbuhan perekonomian dan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe mempunyai program sebagaimana terlihat pada lampiran tabel 3.1 di bawah ini :

TABEL 3.1
PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHKOKSEUMAWE TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA						6,946,715,333.00								6,032,069,324.00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,946,715,333.00							6,032,069,324.00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6,122,556,333.00							5,217,469,324.00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	-			100 Persen	5,842,556,333.00							4,958,869,324.00		
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Capaian Laporan Kinerja	-			4 Dokumen	15,000,000.00			Melanjutkan n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER	-	16,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER	-	16,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Keuangan	-			12 Bulan	4,904,723,245.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER	-	4,071,629,324.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			700 Orang/bulan	4,904,723,245.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER	-	4,071,629,324.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	-			12 Bulan	12,000,000.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER	-	16,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			4 Orang	12,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER	-	16,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi umum	-			12 Bulan	137,140,000.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER	-	223,140,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-													

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		50,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	11,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		17,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		55,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		1,140,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		100,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah				12 Bulan	150,000,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		55,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		55,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang				12 Bulan	539,093,088.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		471,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		1,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	333,353,088.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan a lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		170,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	204,240,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan a lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		300,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			12 Bulan	84,600,000.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan a lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER	-	105,600,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	34,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan a lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		34,100,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				1 Unit	25,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan a lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		25,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan a lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan a lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	DPMPTSP dan NAKER		25,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	-			15.00 Persen	115,000,000.00							128,100,000.00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-			2 Kegiatan	105,000,000.00			Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan a lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Masyarakat, Angkatan Kerja	-	116,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				30 Orang	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb an infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan a lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Masyarakat, Angkatan Kerja		110,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														

			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				5 Lembaga	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat, Angkatan Kerja		6,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-			2 Lembaga	10,000,000.00			Melanjutkan n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		12,100,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				11 Lembaga	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		12,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	-			55.63 Persen	115,000,000.00							33,000,000.00	
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin atau Tanda Daftar LPTKS	-			5 Lembaga	100,000,000.00			Melanjutkan n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	LPTKS atau BKK		17,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				5 Lembaga	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	LPTKS atau BKK		17,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		-			-	15,000,000.00			Melanjutkan n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	Pencari Kerja		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				500 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	Pencari Kerja		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-			100 Persen	50,000,000.00							97,500,000.00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Perselisihan	-			45 Kasus	50,000,000.00			Melanjutkan n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	Perusahaan dan Pekerja		97,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				20 Perkara	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatkan n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	Perusahaan dan Pekerja		97,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						824,159,000.00							814,600,000.00	

1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kemudahan Penanaman Modal	-			40.00 Persen	15,000,000.00						15,000,000.00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	-			1 Dokumen	15,000,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan an ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Pelaku Usaha	-	15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-			1 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan an ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Pelaku Usaha	-	15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal	-			30.00 Persen	30,000,000.00						30,000,000.00		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	-			2 Dokumen	30,000,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan an ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Pelaku Usaha	-	30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan an ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Pelaku Usaha	-	15,100,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-			1 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan an ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Pelaku Usaha	-	15,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan	-			87.98 Indeks	100,000,000.00						169,000,000.00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-			4 Kegiatan	100,000,000.00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan an ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Pelaku Usaha	-	169,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan an ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Pelaku Usaha	-	18,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-			340 Pelaku Usaha	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan an ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Pelaku Usaha	-	31,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-			120 Pelaku Usaha	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan n Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, m eringkatka n lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan an ekonomi Pertumbuh an Ekonomi	Pelaku Usaha	-	31,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe melaksanakan 9 Program dan 17 Kegiatan serta 33 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 7 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan
3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan
4. Program Hubungan Industrial dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
6. Program Promosi Penanaman Modal dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan
7. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan
9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan/Indikator Kerja Program (outcome)/Kegiatan (output) DPMPTSPK Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Program Kegiatan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatkan Jumlah dan Nilai Investasi; 2. Meningkatnya Kesempatan Kerja.

Selain daripada itu Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konsektual dalam melaksanakan tugas, sehingga pada pelaksanaannya dapat mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dari misi agar visi yang telah ditetapkan dapat terwujud di Tahun 2025.

BERITA ACARA
HASIL DESK VERIFIKASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **23** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Opproom Bappeda Kota Lhokseumawe, telah diselenggarakan Desk Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kota Lhokseumawe pada acara pembukaan Desk Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
2. Pembahasan usulan-usulan melalui aplikasi SIPD Kemendagri.
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Desk terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama desk, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024
Waktu : 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Opproom Bappeda Kota Lhokseumawe
Kegiatan : Desk Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

MENYEPAKATI

KESATU : Sistematika renja agar disesuaikan dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling sedikit memuat :

1. Pendahuluan;
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
5. Penutup.

KEDUA : Melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2025 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi :

1. penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim Verifikasi Renja Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

2. menyempurnakan Rincian Belanja Rancangan Akhir Renja sesuai hasil Pembahasan dengan Tim Verifikasi Ranja Tahun 2025 melalui

<https://lhokseumawe.sipd.kemendagri.go.id/daerah>


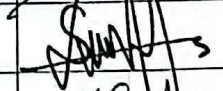
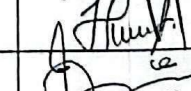
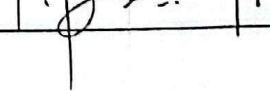
3. memastikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 telah sesuai dengan Rancangan Akhir RPKK Lhokseumawe Tahun 2025;

KETIGA : Hasil Kesepakatan Desk Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025 dan Daftar Hadir Peserta Desk sebagaimana tercantum merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

KEEMPAT : Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025.

Lhokseumawe, 23 Juli 2024

Mewakili Peserta Desk Verifikasi Renja,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ronny, ST, M.S.M	Perencana pada BAPPEDA Kota Lhokseumawe	
2.	M. Sulaiman, SE	Perencana pada BAPPEDA Kota Lhokseumawe	
3.	Masdalena, SH	Perencana pada BAPPEDA Kota Lhokseumawe	
4.	Desi Julianti, S.ST, M.S.M	Perencana pada DPMPSTP dan Naker Kota Lhokseumawe	

Mengetahui,
**Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi dan Ketenagakerjaan,**



Nunung Mariani, S.Si

Pembina, IV/a

NIP. 197710162001122004

**HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN 2025
BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

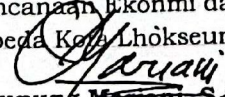
TEMUAN	PENYEBAB	SARAN PENYEMPURNAAN
- Masih ditemukan peraturan Gubernur yang tidak relevan,		- Agar dapat disesuaikan
TEMUAN	PENYEBAB	SARAN PENYEMPURNAAN


1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- Point 'f' Kebijakan realisasi program/kegiatan yang mencapai target kinerja arah kebijakan untuk optimalisasi pencapaian belum ada narasi dalam renja		- Agar dapat disesuaikan dengan kondisi peraturan saat ini dan sesuai tupoksi masing - masing OPD
---	--	---

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

TEMUAN	PENYEBAB	SARAN PENYEMPURNAAN
- Pada tabel target Indikator tujuan dan sasaran RENJA Penulisan pada kolom sasaran diturunkan dibawah penulisan pada kolom tujuan		Agar dapat disesuaikan

Mengetahui,
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan
Bappeda Kota Lhokseumawe

Nunung Mariani, S.Ei
Nip. 19771016 200112 2 004

Lhokseumawe, 20 Agustus 2024
Verifikator

M. Sulaiman, SE
Nip. 19820510 200904 1 006

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Renja Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan
		Ada	Tidak Ada		
[(1)]	[(2)]	[(3)]	[(4)]	[(5)]	[(6)]
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan agenda kerja	√			
2	Pengelolaan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat Daerah.	√			
4	Mengkaji hasil Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
5	Penentuan isu-isu penting, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan Program dan Kegiatan Musrenbang kabupaten/kota.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.c.	mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat Daerah Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendapat program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai surat edaran Walikota.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar perangkat Daerah Provinsi dengan perangkat Daerah Lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Daerah telah dibahas dalam forum perangkat Daerah Kabupaten/Kota		x	Tidak ada anggaran DOKA	Usulan DOKA MPP Tahun Mendatang
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan.	√			

Lhokseumawe, Tanggal 17 Juli 2024
Pit. KEPAJARAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKEUMAWE




Taufik, S.Sos, MSP
 Np. 19650812 198708 1 001

